

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses ke barang dan jasa, lokasi, geografi, gender, dan kondisi lingkungan, dll. Masalah kemiskinan tidak hanya menimpa negara-negara miskin dan negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju, jadi bisa dikatakan masalah kemiskinan telah menjadi permasalahan global.

Pengertian kemiskinan menurut BPS dan Depsos (2002) dalam Ika Widiastuti (2021) adalah kemiskinan hanya dikaitkan dengan ekonomi secara keseluruhan. Sementara kemiskinan dapat dilihat dari perspektif sosial dan budaya, Pada tingkat fundamental, kemelaratan menggambarkan keadaan tidak memiliki dan pendapatan rendah, atau lebih detail menggambarkan kondisi di mana kebutuhan manusia yang penting yaitu pangan, papan dan sandang yang tidak dapat dipenuhi. Kondisi ketidakadnan dijelaskan oleh sejumlah definisi yang berbeda. Definisi kemiskinan BPS, yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan esensial untuk hidup layak, adalah salah satunya (Ika Widiastuti, 2021).

Badan Pusat Statistik memaparkan jumlah angka kemiskinan dari

sejumlah besar rupiah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan dan perlengkapan lainnya untuk terus bertahan pada kehidupan yang layak.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa atau 9,45% menurun 0,17 % dari September 2021, begitu juga di Provinsi Kepulauan Riau tingkat kemiskinannya sangat bervariasi dari tahun ke tahun, baik yang mengalami penurunan maupun peningkatan angka kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau telah mempublikasikan data peningkatan jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau pada maret 2022 mencapai 151,68 ribu jiwa atau 6,24 %. Angka yang disebutkan tersebut bertambah cukup banyak yaitu sebanyak 137,75 ribu jiwa atau 5,75% dibandingkan pada bulan Maret 2021 yang sebesar 144,46 ribu jiwa atau 6,12% sedangkan pada bulan September 2021 (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) sebanyak 137,75 ribu jiwa atau 5,75% . Data ini diikuti tingkat kemiskinan dari sejumlah Kabupaten atau Kota di Kepulauan Riau, yang angka kenaikannya sebanyak 13,9 ribu orang.

Berdasarkan pada data BPS pada tahun 2021-2022 Kabupaten Bintan menempati posisi ke lima dalam data penduduk miskin di Kepulauan Riau dengan jumlah 10,54 ribu jiwa dari keseluruhan penduduk miskin di Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan adalah salah satu Kabupaten di Kepulauan Riau.

Kabupaten Bintan merupakan Kota atau Kabupaten di Kepulauan Riau yang mempunyai angka kemiskinan. Bintan utara adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Bintan yang memiliki jumlah penduduk 22,527 ribu jiwa yang mana terdapat penduduk miskin yang berada di setiap kelurahan dan desa di kecamatan tersebut. Salah satunya ada di Desa Lancang Kuning dengan jumlah penduduk 1638 jiwa dengan presentase kemiskinan 36,23% atau 594 jiwa.

Penanggulangan kemiskinan adalah strategi pemerintah yang dilakukan secara terorganisir, untuk mengurangi angka penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program penangetasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu salah satunya adalah program jaminan sosial, perluasan akses masyarakat miskin ke pemerintahan pusat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan-pembangunan, dan berbagai program kegiatan usaha masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah penting yang harus diatasi. Pengetasan kemiskinan dilakukan secara sinergis yang harus dilengkapi dengan tujuan agar seluruh warga dapat ikut serta dalam kehidupan yang bermartabat. Maka dari itu, kerja sama antara pemerintah sangat diperlukan dan masyarakat ikut serta dalam mewujudkan program yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu dengan cara menjalankan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Penanggulangan kemiskinan yang telah pemerintah tetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan (2011)

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang harus dipecahkan semua pemangku kepentingan, baik tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemensos memiliki program reguler yang selama ini sudah teruji efektif mengurangi kenaikan angka kemiskinan. Kemensos menyiapkan dua program untuk mengatasi kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Kemensos juga terus melanjutkan berbagai program yang diharapkan menambah efektivitas upaya meredam dampak pandemi baik di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin. Kemensos menjelaskan tentang realisasi program penanganan pandemi. Ada tiga program bantuan sosial (bansos) telah selesai disalurkan. Ketiga program tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/ Bantuan pangan non tunai (BPNT) Non-PKH, dan Bansos Beras (BSB). Tiga program Kemensos dalam mengatasi kemiskinan dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Keluarga Harapan

Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang

disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

b. Program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/ Bantuan pangan non tunai (BPNT) Non-PKH

Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu Bantuan Tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemensos RI untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID 19. Bantuan Pangan Non Tunai atau dikenal juga sebagai BPNT adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu setiap bulannya.

c. Bansos Beras (BSB)

Bansos Beras dengan jangkauan 10 juta KPM dengan pagu Rp5,26 triliun, telah tersalurkan semua sebanyak 450.000 ton beras medium. Untuk BSB, telah secara resmi ditutup oleh Mensos di Kendal beberapa waktu lalu.

Sedangkan Pemprov Kepri memberikan atensi untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Kepri. Ada empat program strategis bagi menekan permasalahan kemiskinan. Empat fokus penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepri yaitu pertama adalah penanganan Infrastruktur dasar berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih, dan listrik. Kedua adalah bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan Program Keluarga

Harapan (PKH). Ketiga, upaya yang akan dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil seperti Posyandu, RT/RW, Bumdes, UMKM, Perikanan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Sedangkan yang keempat melalui program beasiswa bagi siswa tidak mampu.

Dari empat program dari Pemprov Kepri salah satu programnya adalah pemberdayaan masyarakat dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program Kementerian Sosial yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, melalui KUBE, kepala keluarga (KK) miskin yang telah memiliki kegiatan usaha, akan mendapatkan suntikan dana dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota/kabupaten setempat.

Dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada Kelompok Usaha Bersama merupakan program yang tidak hanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi Kelompok Usaha Bersama juga berpotensi menjadikan masyarakat mandiri dengan skill berwirausaha dari mengikuti program Kelompok Usaha Bersama ini. Dengan adanya program Kelompok Usaha Bersama ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian, mambah pengetahuan dan keterampilan serta dapat menambah relasi.

Permensos No. 2 Tahun 2019 tentang Dukungan Kelompok Usaha Bersama Penanggulangan Kemiskinan Usaha Ekonomi Produktif dan Usaha Sosial.

Program penanganan kemiskinan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang sedang dikembangkan saat ini. Kementerian Sosial telah menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan ini sejak tahun 2003 dan berhasil membentuk LKM-KUBE sejahtera diseluruh wilayah di Indonesia (Tami Astari Zulkarnain & Yuliani, 2020).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan. Program ini berarti memungkinkan individu dengan kemampuannya sendiri untuk keluar dari masalah kemiskinan. Dalam upaya melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Usaha ekonomi produktif (UEP) adalah bantuan sosial yang diberikan pada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan rakyat. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beranggotakan 5 sampai 20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang termasuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan masyarakat kurang mampu.

Salah satu pilihan kebijakan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif dan lembaga keuangan mikro adalah dengan adanya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi masyarakat miskin di tengah-tengah masyarakat.

Prinsip pelaksanaan KUBE adalah:

- 1) Memperkuat organisasi/lembaga tradisional yang ada di masyarakat
- 2) Pendirian lembaga pemberdayaan sosial baru melalui inisiatif lokal
- 3) Anggotanya adalah masyarakat miskin yang bersedia ber usaha
- 4) Bertempat tinggal di daerah yang berdekatan
- 5) Kepala rumah tangga berusia produktif 18-58 tahun
- 6) Pendamping Kelompok Usaha Bersama sebagai agen perubahan (agent of change)

Untuk memfasilitasi pengelolaan Kelompok Usaha bersama (KUBE) maka membutuhkan pendamping yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemberian Usaha Ekonomi Produktif kepada KUBE akan memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya dan kemampuan masyarakat dalam berusaha sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri serta meningkatkan solidaritas sosial (Herniyati et al., 2022).

Kelompok Usaha bersama (KUBE) juga didirikan di salah satu desa yang ada di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tepatnya desa Lancang Kuning. Kelompok Usaha Bersama yang dilaksanakan oleh penduduk di Desa Lancang Kuning yaitu dengan tujuan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Di desa ini terdapat 6 KUBE yang telah terdaftar yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Daftar KUBE di Desa Lancang Kuning

NO	Nama Kube	Jumlah Anggota	Tahun Berdirinya
1	KUBE Asoka	10 Orang	2015
2	KUBE Bawal	8 Orang	2015
3	KUBE Sorgum	10 Orang	2022
4	KUBE Markisa	10 Orang	2015
5	KUBE Mangga	10 Orang	2015

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil observasi yang prapenelitian yang telah lakukan, diketahui bahwa di dalam Kelompok Usaha Bersama ini masyarakat Desa Lancang Kuning membuat berbagai kegiatan seperti membuat produk seperti dodol salak, sorgum, opak, dan lain sebagainya yang mana hasil produk itu akan dipasarkan, mengadakan kegiatan arisan, membuat koperasi simpan pinjam dan kegiatan lainnya.

Kegiatan-kegiatan dalam program Kelompok Usaha bersama (KUBE) di Desa Lancang Kuning bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan anggota, menumbuhkan kesadaran masyarakat miskin mengenai pentingnya membangun usaha bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk mengupayakan ketercapaian kesejahteraan masyarakat setempat terutama anggota Kelompok Usaha bersama (KUBE). Dari hasil penjualan produk Kelompok Usaha bersama (KUBE)

dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga, kemudian kegiatan arisan dan koperasi simpan pinjam dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya melalui sosialisasi secara langsung dan penyaluran dana untuk kegiatan usaha.

Namun, meskipun program Kelompok Usaha Bersama sudah berjalan ternyata masih belum efektif, seperti terdapat beberapa kendala di beberapa kelompok dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama kendalanya dapat berupa anggota Kelompok Usaha Bersama memproduksi suatu produk tetapi produk tersebut belum diketahui bagaimana agar bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dan belum adanya strategi khusus dalam melakukan pemasaran produk hasil kegiatan Kelompok Usaha Bersama, dan permasalahan pada modal usaha yang mana mestinya dimanfaatkan untuk membantu dalam pembentukan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menganggap perlu dilakukannya studi terhadap pelaksanaan program Kelompok Usaha bersama (KUBE) di Desa Lancang Kuning.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul **“Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang di atas, maka peneliti dapat mermuskan masalah penelitian ini yaitu:

Bagaimana proses implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Lancang Kuning?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Lancang Kuning dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Kegunaan Teoritis, penggunaan teori penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan meperkaya wawasan Ilmu Administrasi Publik. Menjadi sumber wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang implementasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan diharapkan menjadi referensi bagi penelitian serupa.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bermanfaat bagi pemerintah Desa Lancang Kuning dan piha-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KUBE.